



## TURUNKAN SKOR INDIKATOR KUMUH Pemkot Fokus ke Prenggan Gunakan APBD

**YOGYA (KR)** - Penataan kawasan kumuh menjadi tanggung jawab lintas sektor antara kota, provinsi dan pusat. Pada tahun ini Pemkot Yogya fokus melakukan penataan di Kampung Sambirejo Prenggan dengan menggunakan anggaran daerah atau APBD.

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogya Sigit Setiawan, menjelaskan penataan di wilayah Sambirejo Prenggan tersebut di alokasikan Rp 1,8 miliar. "Sepenuhnya itu melalui APBD Kota Yogya di tahun ini. Penataan kawasan kumuh di lokasi tersebut menjadi satu-satunya penataan permukiman kumuh skala kawasan yang dikerjakan tahun ini," jelasnya, Kamis (4/8).

Kawasan tersebut sebenarnya sudah tidak masuk dalam skor penilaian kawasan kumuh. Apalagi pada tahun 2019 pernah dilakukan penataan menggunakan skema pembiayaan dari APBN atau pemerintah pusat. Akan tetapi masih ada persoalan sedikit yang menyangkut indikator sanitasi. Hal ini karena di kawasan tepi sungai tersebut masih banyak masyarakat yang langsung membuang limbah ke sungai.

Oleh karena itu, salah satu bentuk penataan di wilayah Sambirejo Prenggan ialah dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Terutama agar tidak ada lagi limbah yang dibuang langsung ke sungai. "Pekerjaan kami tahun ini hanya menuntaskan saja supaya skor indikator kumuh dari aspek sanitasi menjadi nol,"

imbuhnya.

Selain membangun IPAL komunal, dalam penataan itu juga akan dibangun jalan lingkungan tepi sungai, pembangunan pagar pembatas, penguatan talut serta penerangan jalan umum. Tahap pekerjaan juga telah dimulai sejak akhir Juni lalu dan ditargetkan selesai pada akhir November mendatang.

Sigit memaparkan, selain menggunakan dana dari APBD pihaknya sudah mengusulkan penanganan kawasan kumuh ke pemerintah pusat untuk dibiayai menggunakan APBN pada tahun ini. Akan tetapi usulan yang disampaikan belum dapat dipenuhi tahun ini karena kebutuhan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu Pemkot Yogya hanya mengandalkan APBD untuk penanganan permukiman kumuh. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005